

STRATEGI PEMERINTAH NAGARI DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM NAGARI MADANI DI NAGARI BALAI GURAH KABUPATEN AGAM

Resky Pratama^{1b}, Hasbullah Malau¹

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^breskypratama561@gmail.com

Abstract

This research was carried out by utilizing a qualitative approach through descriptive methods. In selecting respondents, researchers use purposive sampling techniques as a method to determine research informants. In this study, data were collected through three techniques, namely interviews and observation and documentation. To ensure the validity of the data, researchers apply the triangulation method technique. Meanwhile, in the process of data analysis, three stages are used, namely data reduction and data presentation and conclusions. The results showed that the implementation of the Nagari Madani Program policy was seen from indicators, namely (1) communication. The form of communication is starting from building a communication forum through holding various traditional art activities, religious activities again kesurau. (2) Resources are still lacking in professional GNM coaches and cadres in socializing and running GNM programs in Balai guruh nagari (3) disposition based on its objectives, namely those stated in Agam Regent regulation Number 74 of 2016 concerning guidelines for the implementation of the Nagari Madani Movement. (4). The bureaucratic structure of the GNM program has been running in accordance with regulations, namely from local governments derived from the nagari government. Meanwhile, the inhibiting factors are the lack of professionalism of GNM workers and cadres in socializing and running the GNM program in Balai guruh and the limited funds available in the implementation of the GNM program.

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Dalam memilih responden, peneliti menggunakan teknik purposive sampling sebagai metode untuk menentukan informan penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik yaitu wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi metode. Sedangkan dalam proses analisis data, digunakan tiga tahap yaitu reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Nagari Madani dilihat dari indikator yaitu (1) komunikasi. Bentuk komunikasi yakni mulai dari membangun wadah komunikasi melalui dengan mengadakan berbagai kegiatan seni tradisional, kegiatan keagamaan kembali kesurau. (2) Sumberdaya masih kurang profesionalnya Pembina dan kader GNM dalam mensosialisasikan serta menjalankan program GNM di nagari Balai guruh (3) disposisi berdasarkan tujuannya yakni yang tertera pada peraturan Bupati Agam Nomor 74 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan GNM. (4). Struktur Birokrasi pada program GNM ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yakni dari pemerintah daerah

diturunkan pada pemerintah nagari. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu sumberdaya masih kurang profesionalnya pembina dan kader GNM dalam mensosialisasikan serta menjalankan program GNM di nagari Balai guruh serta masih terbatasnya dana yang tersedia dalam pelaksanaan program GNM.

Kata Kunci: Strategi, implementasi dan program Nagari Madani

Pendahuluan

Nagari adalah sebuah badan hukum sosial yang memiliki batasan suatu wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat. Tentunya ini didasarkan inisiatif dari masyarakat dengan mengacu pada hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Madani adalah suatu prinsip suatu kehidupan yang mencakup nilai yang diembankan oleh Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wasallam dalam menjalankan pemerintahan dan membentuk masyarakat yang dijadikan sebagai dasar nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat. Prinsip ini didasarkan pada nilai keadilan dan musyawarah serta mufakat, persaudaraan, mengembangkan rasa cinta terhadap tanah air, serta mengakui -hak asasi manusia.

Nagari madani merujuk pada suatu nagari yang berlandaskan pada nilai-nilai religius/islami, yang memiliki tingkat peradaban yang tinggi dan maju. Nagari ini didasarkan pada norma-norma, hukum, dan moral yang berasal dari Adat yang dijiwai oleh syarak, syarak yang bersumber dari kitabullah, dan syarak yang menghargai adat istiadat yang ada. Masyarakat yang hidup di nagari ini menganut ukhuwah islamiyyah, menghormati perbedaan, bersikap demokratis, inklusif, serta memupuk semangat gotong royong dan kekeluargaan.

Peraturan bupati Agam tentang pelaksanaan Gerakan Nagari Madani didasarkan pada beberapa peraturan dan dokumen, yaitu Perda Kabupaten Agam Nomor 6 tahun 2016, RPJMD tahun 2016, Perbup Nomor 74 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan Gerakan Nagari Madani, Pedoman dalam menerapkan kebijakan Nagari Madani sesuai dengan isi Perbup Nomor 74 tahun 2016.

Kebijakan Kembali ke Nagari yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh beberapa kabupaten / kota, pada intinya memperkuat eksistensi nagari sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan terendah di Minangkabau. Tidak hanya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, kembali ke nagari fokus pada penataan kelembagaan daerah. Di Kabupaten Agam, pemerintah daerah telah menginisiasi Gerakan Nagari Madani sebagai bentuk Kembali ke Nagari yang menitikberatkan pada optimalisasi kondisi ekonomi dan sosial.

Kebijakan ini cenderung top down dari inisiatif pemerintah. Nilai yang diembankan oleh Nabi Muhammad dalam pemerintahan dan penyelenggaraan masyarakat menjadi landasan utama bagi Nagari Madani. Nagari ini mengedepankan nilai kesetaraan, musyawarah dan ukhuwah serta rasa cinta terhadap tanah air, dan pengakuan hak asasi manusia. Implementasi kebijakan nagari madani bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kebebasan, keadilan, partisipasi dan egaliter. Dan dengan tercapainya tujuan tersebut dapat menjadi solusi atas permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat.

Gagasan utama dari program nagari madani ini ialah agar dapat mengembalikan kejayaan masyarakat minang kabau seperti pada masa dahulu. Surau sebagai tempat menuntut ilmubagi masyarakat sendiri memiliki beberapa fungsi diantaranya: (a) Surau sebagai lembaga pendidikan. (b) Surau berperan dalam Proses akulturasi Islam dengan adat Minangkabau. (c)

Fungsi surau bergerak dinamis sebagaimana halnya dengan system pembelajaran. (d) Lembaga surau telah menghasilkan sejumlah ulama serta tokoh masyarakat yang ikut membakar semangat masyarakat untuk melepaskan diri dari penjajahan.

Dengan latar belakang kerinduan untuk merasakan kehidupan masyarakat seperti masa lampau membuat pemerintah membuat sebuah program nagari madani, agar dapat menata kembali kehidupan masyarakat sehingga dapat kembali kepada tatanan kehidupan awal sehingga dapat menciptakan dan menguatkan kembali sendi-sendi kehidupan beragama dikalangan masyarakat. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah Kabupaten, dan dijalankan oleh pemerintah nagari. Namun didalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan dan keterlambatan pencapaian tujuan dari program ini, masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui bagaimana dan apa itu gerakan nagari madani menandai kurangnya sosialisasi dari pemerintah nagari terhadap masyarakat. Selain itu, masih kurangnya atau belum tercapainya tujuan dari pemerintahan kabupaten oleh pemerintah nagari juga menandai bahwa masih kyrangnya kebijakan atau terobosan yang dibuat oleh pemerintah nagari didalam pencapaian tujuan dari nagari madani.

Program-program nagari madani yang sudah diterapkan dan hambatannya:

1. Melakukan kerja sama dengan perguruan Al-Quran di nagari serta masjid-masjid dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta antusias masyarakat terhadap Al-Quran.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak Kerapatan Adat Nagari dalam rangka menghidupkan kembali peran Mamak, Bundo Kandung, Datuak, dss di Nagari Balai Gurah. Namun didalam pelaksanaan program dan kerjasama di atas terdapat beberapa hambatan yaitu: (a) Kurang terjalinya komunikasi yang baik antara pihak mesjid dan juga perguruan Al-Quran dengan pihak pemerintahan Nagari, sehingga tujuan yang ingin di capai berjalan dengan lambat (b) Kurang berjalanya peran dari Kerapatan Adat Nagari sehingga sulit dilakukanya kerja sama antara Kan dan jutga pemerintahan Nagari.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan kualitatif dengan berbentuk metode deskriptif. Peneliti menggunakan suatu metode purposive sampling untuk menentukann informan dari penelitian. Teknik pengumpulan suatu data meliputi wawancara dann observasi serta dengan berbentuk dokumentasi. Peneliti menggunakan suatu teknik triangulasi metode untuk menguji suatu keabsahan data. Teknik analisis data meliputi reduksi data dan penyajiann data serta suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi kebijakan GNM mengacu pada Peraturan Bupati Agam No 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan GNM. Kebijakan GNM adalah kebijakan untuk meningkatkan pemahaman serta pengamalan suatu nilai agama khususnya nilai-nilai keislaman dan nilai nilai adat, ide dasar kebijakan ini adalah untuk menciptakan suasana yang religius, persaudaraan muslim, dan masyarakat maju yang pernah ada dalam kehidupan masyarakat di Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW.

Kebijakan Gerakan Nagari Madani memiliki tujuan sebagai berikut: (1) Mewujudkan pemahamann serta pengamalan dari nilai agama, khususnya terkait dengan keislaman; (2) mewujudkan suatu pemahamann dan pengamalan nilai dari adat basandi syarak, syarak basandi

kitabullah. Pemerintah Kabupaten Agam telah menerapkan GNM, tentunya inti dalam meningkatkan suatu pemahaman serta pengamalan nilai-nilai adat, terutama adat basandi syarak syarak basandi kitabullah, karena nilai-nilai adat ini merupakan jati diri masyarakat di Sumatera Barat. Kebijakan GNM bertujuan untuk meningkatkan dan mengamalkan nilai-nilai adat.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan di lapangan mengenai Strategi pemerintah nagari Balai Gurah kecamatan ampek angkek Maka dari itu penulis mencoba memberikan gambaran mengenai strategi pemerintah nagari Balai gurah kecamatan ampek angkek dalam implementasi gerakan nagari madanai dengan menggunakan teori dari Edwards III dalam (Subarsono, 2006) Startegi pemerintah dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:

1. Komunikasi

Peranan sebuah komunikasi sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan atau program. Agar program dapat berjalan secara efektif, penting bagi individu yang terlibat dalam pencapaian tujuan suatu kebijakan. Hal ini agar dapat memahami ukuran dan tujuan dari kebijakan. Menurut Edward seperti yang dikutip oleh Budi Winarno (2007:174), komunikasi memiliki peran penting dalam cara kebijakan disampaikan kepada suatu organisasi dan masyarakat serta dalam sikap dan tanggapan dari semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi. Dalam membantu menjalankan program GNM tidak dapat dipugkiri bahwa komunikasi menjadi unsur penting terciptanya keberhasilan dan kesuksesan dalam pencapaian tujuan dari GNM di nagari balai gurah kecamatan ampek angkek.

Pelaksanaan GNM di Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek didasarkan pada Perbub Agam Nomor 74 tahun 2016, yaitu pedoman untuk menjalankan GNM. Tujuan dari GNM yakni untuk mewujudkan suatu pemahaman serta pengamalann nilai agama, khususnya nilai keislaman, serta nilai-nilai adat yang berdasarkan pada ABS-SBK.

Bentuk strategi pemerintah dalam hal komunikasi dalam Implementasi gerakan GNM di Nagari Balai Gurah, kecamatan ampek angkek ini Bentuk strategi yang dilakukan yakni berupa mulai membangun wadah komunikasi melalui dengan mengadakan berbagai kegiatan seni tradisonal, kegiatan keagamaan kembali kesurau yang menjadi sentra kehidupan masyarakat nagari agar kaum muda dan kaum yang dituakan bisa berkumpul dan saling berkomunikasi, mulai membangun hubungan dan komunikasi satu arah dengan lembaga KAN dan mulai meningkatkan peran lembaga adat di Nagari Balai Gurah.

Namun dalam pelaksanaannya belum dijalankan secara optimal karena dapat kita lihat bahwa berbagai program-program dari Nagari Madani sudah tidak berjalan optimal, karena kurangnya kkomunikasi dari tim kader dari GNM untuk mengajak masyarakat serta kurangnya pasrtisipasi yang diberikan oleh masyarakat dalam setiap program GNM ini sehingga setiap kegiatan menjadi tidak berjalan optimal.

2. Sumber Daya

Menurut Edward III yang dikutip dalam Tahir (2014:466), sumber daya mencakup sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan. Sedangkan menurut George Edward yang dikutip dalam Tangkilisan (2003:55-58), sumber daya dilihat dari segi sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Dalam suatu organisasi, ketersediaan staf beserta kualitasnya merupakan hal yang penting.

Dalam membantu menjalankan program GNM tidak dapat dipugkiri bahwa sumberdaya

menjadi salah satu unsur terpenting terciptanya keberhasilan dan kesuksesan dalam pencapaian tujuan dari GNM di nagari Balai Gurah kecamatan ampek angkek. Dari hasil dilapangan menunjukkan bahwa Sumberdaya dalam pengimplementasian Program GNM di nagari balai gurah kecamatan ampek angkek masih belum memadai secara optimal dikarenakan dinilai masih kurang profesionalnya kader GNM dalam membimbing dan mensosialisasikan program-program GNM kepada masyarakat. dan faktor sumber daya yakni sumber daya dana. Dalam pengimplementasian program GNM di nagari madani hanya mengandalkan dana dana APB Nagari dan dana-dana bantuan dari masyarakat-masyarakat nagari hal ini dirasa tidak cukup memadai dalam membiayai setiap program dalam pelaksanaan program GNM. Sehingga menyebabkan program GNM di nagari Balai Gurah kecamatan ampek angkek ini tidak berjalan secara optimal.

3. Disposisi

Edward III yang dikutip dalam Tahir (2014:67), disposisi mengacu pada keinginan dan niat para pelaku kebijakan dalam melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, dengan tujuan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Edward III dalam Tahir (2014:68) juga menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan para pelaksana yang tidak hanya memiliki suatu pengetahuan serta keterampilan dalam menjalankan suatu kebijakan, tetapi juga memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut agar efektif dan efisien.

Dalam membantu menjalankan program GNM pengaruh disposisi menjadi salah satu unsur penting terciptanya keberhasilan dan kesuksesan dalam pencapaian tujuan dari GNM di nagari balai gurah kecamatan ampek angkek. Para pelaksana yang memiliki disposisi yang positif terhadap kebijakan tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga memiliki kemauan dan keinginan yang kuat untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh.

Dari hasil dilapangan menunjukkan bahwa disposisi dalam pengimplementasian Program GNM di nagari balai gurah kecamatan ampek angkek ini dijalankan sesuai dan berpedoman dengan peraturan yang ada yakni Perbub Nomor 74 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan GNM dan beberapa aturan lainnya dari implementasi peraturan yang telah ditetapkan, diantaranya ialah Keputusan Menteri Agama RI No. 150 Tahun 2013 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Maghrib Mengaji, Perda Agam Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca dan Tulis Huruf Al-Qur'an, Perda Agam Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim.

Tujuan dari Pelaksanaan Program Gerakan Nagari Madani terdiri dari dua bagian, yaitu tujuan umum untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Agam yaitu Agam yang madani dan tujuan khusus yang terdiri dari optimalisasi pendidikan informal khususnya Al-Quran (membaca, memahami, mengamalkan, dan menghafal), meningkatkan peran Masjid/Surau sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat, perlindungan atas kampung dan masyarakat nagari, meningkatkan rasa kepedulian sosial dan ukhuwah islamiyah dan kekeluargaan serta gotong royong,

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:107), struktur birokrasi memiliki suatu peran penting dalam keberhasilannya implementasi suatu kebijakan. Hal ini berkaitan dengan jelas atau tidaknya SOP khususnya sistem, pembagian untuk tugas, kewenangan, serta tanggung jawab di antara para pelaku.

Strategi pemerintah dalam implementasi gerakan nagari madani di nagari balai guruh kecamatan ampek angkek sendiri ialah dijalankan sesuai dengan prosedur birokrasi yakni berdasarkan peraturan peraturan Bupati agam Nomor 74 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan gerakan nagari madani.

Yang selanjutnya melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengimplementasian GNM ini ialah melibatkan semua elemen masyarakat seperti alim ulama Nagari, ninik mamak, Bundo Kanduang, cadiak pandai, parik paga, dan masyarakat dalam Nagari. Selanjutnya dengan dibantu oleh Tim Pembina kader dan tim kader GNM yang untuk membantu mewujudkan tujuan dari gerakan nagari madani ini yakni mewujudkan suatu pemahaman serta pengamalan nilai dari agama khususnya nilai keislaman.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Strategi pemerintah nagari dalam mengimplementasikan program nagari madani di nagari Balai Gurah Kabupaten Agam dapat disimpulkan bahwa dalam Faktor komunikasi pada strategi pemerintah nagari dalam implementasi program nagari madani di nagari balai guruh kabupaten agam telah dilakukan berbagai bentuk komunikasi yakni mulai dari membangun wadah komunikasi melalui dengan mengadakan berbagai kegiatan seni tradisonal, kegiatan keagamaan kembali kesurau yang menjadi sentra kehidupan masyarakat nagari agar kaum muda dan kaum yang dituakan bisa berkumpul dan saling berkomunikasi, mulai membangun hubungan dan komunikasi satu arah dengan lembaga KAN dan mulai meningkatkan peran lembaga adat di Nagari Balai Gurah, namun hal tersebut masih belum terlaksana secara optimal.

Pada faktor Sumberdaya masih kurang profesionalnya Pembina dan kader GNM dalam mensosialisasikan serta menjalankan program GNM di nagari Balai guruh serta masih terbatasnya dana yang tersedia dalam pelaksanaan program GNM ini sehingga dalam implementasinya masih belum berjalan secara optimal, serta dalam Faktor Disposisi program GNM ini sudah dijalankan berdasarkan tujuannya yakni yang tertera pada perbub Agam No74 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan GNM dan beberapa aturan lainnya dari implementasi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam faktor Struktur Birokrasi pada program GNM ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan yakni dari pemerintah daerah diturunkan pada pemerintah nagari yang selanjutnya pemerintah nagari dibantu oleh Tim Pembina GNM serta kader GNM dalam menjalankan pemberdayaan dan sosialisasi program pada lembaga adat nagari serta melibatkan semua masyarakat pada lingkup nagari tersebut.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, Solichin. (2001). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Budi Winarno. (2007). Kebijakan Publik: Teori & Proses. Yogyakarta: Media Presindo
- Hesel Nogi S. Tangkilisan. (2003). Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPASI
- Isnarmi, I., Eriyanti, F., Yusran, R., & Murniyetti, M. (2018). The Movement of Nagari Madani: An Islamic Values-Based Social Policy in Agam District. In ICSScE 2018
- Kenedi, Jon dan Zul efendi. (2017). Penerapan teori organisasi z untuk memperbaiki kinerja BMT Agam Madani di Kabupaten Agam. Ekonomika Syariah. Journal of Economic

Studies Vol. 1, No. 2.

LKAAM. (2000). Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau. Padang: Yayasan Sako Batuah hal. 2

Mulyadi, deddy. (2016). studi kebijakan publik dan pelayanan publik. bandung: ALFABETA
Peraturan Bupati Agam Nomor 74 tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Madani

Peraturan Bupati Agam, No 74 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nagari Riant Nugroho Dwijowijoto. (2003). Kebijakan Publik. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung

Wayne Parsons. (2006). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana